



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025.

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 16), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
3. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
7. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
9. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
11. Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
15. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
17. Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
20. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
21. Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
22. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
23. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
24. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
26. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
28. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
29. Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
30. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
31. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
32. Biro Umum Setda Provinsi Bali.
33. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
34. Badan Penghubung Provinsi Bali.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP.196910-09-01-1997031012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025**



**BAPPEDA PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dalam Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Perubahan Renja ini memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan memperhatikan target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali 2025 ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami harapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sehingga dalam penyusunan selanjutnya dapat lebih disempurnakan.

Bali, 9 Juli 2025
Kepala Bappeda Provinsi Bali,



I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos.,M.Si
NIP. 19710814 200003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	8
BAB III MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
BAB IV PENUTUP.....	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai sampai Triwulan I Tahun 2025.....	9
Tabel 2. Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali.....	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanananaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 ini disusun RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. SE Mendagri ini mengamanatkan Pemerintah Daerah menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan, dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini, kemudian dengan adanya SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ yang mengamanat untuk mengakomodasi asta cita dalam pembangunan di daerah tahun 2025, serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan

perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dimaksud seperti: (1) penyesuaian tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2025; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus disesuaikan.

Sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *topdown* dan *bottom-up*. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Semesta Berencana Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, maka perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 dapat ditetapkan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7); dan

14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 12);
15. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sesuai dengan amanat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan amanat tersebut maka maksud disusunnya Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran tentang perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bali dalam satu tahun anggaran untuk menuju terwujudnya tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, serta untuk peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 menuju tahapan penyusunan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2025.

2. Tujuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 368 Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah. Dengan demikian tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 adalah:

- a. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan anggaran).
- b. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah.
- c. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat: Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat: matrik perubahan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta pagu pendanaannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target, atau bahkan melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan atau pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada Triwulan I.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai 87,13 (100%)	Nilai 86,24	100%	Nilai 87,15 (100%)	Nilai 87,15 (100%)	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	25%
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	11 dokumen	27,27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Target Dokumen RKA SKPD di akomodir dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Target Dokumen Perubahan RKA SKPD di akomodir dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
						DPA-SKPD		
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	15 laporan	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	100%	Target Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di akomodir dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	15,54%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan						
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	59 Orang/bulan	100%	71 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	12,60%
5.01.01.1.02.0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 dokumen	1042 dokumen	192,96 %	540 dokumen	1000 dokumen	19,70%
5.01.01.1.02.0003	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	14 dokumen	14 dokumen	28,57%
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	100%	100%	100%	100%	100%	17,65%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	-
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 paket	4 paket	100%	7 paket	7 paket	40%
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%	3 paket	3 paket	-
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	-
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	25%
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	25%
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	66,67%	66,67%	100%	100%	-
5.01.01.107.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	-	0,00%	2 paket	2 paket	-
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2 unit	100%	1 unit	1 unit	-
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disesuaikan	100%	100%	100%	100%	100%	12,50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		kebutuhan						
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	3 laporan	33,33%
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	-
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	100%	88,76%	88,76%	100%	100%	0,44%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 unit	32 unit	100%	31 unit	31 unit	3,23%
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	201 unit	120 unit	85,71%	190 unit	190 unit	-
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	-
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	1 berita acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	-
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 berita acara	1 berita acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	-
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
	Provinsi	(RPJPD/RPJMD/RKPD)						
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	-
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	6 masukan	100%	6 dokumen	6 dokumen	-
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	1 buku	100%	1 buku	1 buku	-
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Kesesuaian Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	12,20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
	Pembangunan Daerah	Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah						
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	25%
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	6 laporan	50%
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 dokumen	19 dokumen	100%	27 dokumen	27 dokumen	-
5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Validitas Data Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota						
5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		Pembangunan Manusia dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA						
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
	Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana Tabel 1 diatas, sub kegiatan rata-rata masih berada dibawah 50%. Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja pada Triwulan I sebagai berikut :

- a. Penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan kebijakan anggaran;
- b. Proses administrasi kegiatan yang masih dalam tahap awal pelaksanaan penyusunan dokumen;
- c. Masih dalam proses pengadaan barang dan jasa (kendala TKDN);
- d. Adanya beberapa belanja yang menyesuaikan dengan standar harga.

BAB III

MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 serta berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Bappeda Provinsi Bali dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2025 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down* dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 mencerminkan penyesuaian terhadap target kinerja, output kegiatan, serta sumber dan besaran pendanaan yang dialokasikan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Bali dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 ditampilkan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/(BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERENCANAAN				29.056.451.327	27.349.354.927	27.707.328.292	357.973.365	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai 87,13	Nilai 87,13	23.240.773.183	22.805.921.183	23.163.894.548	357.973.365	
5	01	01	1.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen	286.122.014	231.698.014	231.698.014	0	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	227.981.114	203.909.114	203.909.114	0	
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.474.400	11.474.400	11.474.400	0	
5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.444.900	11.444.900	11.444.900	0	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	35.221.600	4.869.600	4.869.600	0	
5	01	01	1.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	16.671.010.143	16.671.010.143	16.671.010.143	0	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	123 Orang/Bulan	16.365.850.481	16.365.850.481	16.365.850.481	0	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	176.934.150	176.934.150	176.934.150	0	
5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	128.225.512	128.225.512	128.225.512	0	
5	01	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	48 Jenis	48 Jenis	1.887.106.486	1.506.678.486	1.646.669.686	0	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	64.000.810	64.000.810	64.000.810	0	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	730.788.232	730.788.232	870.779.432	139.991.200	Penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Set/Bappeda
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	129.063.004	129.063.004	129.063.004	0	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	66.119.210	56.483.210	56.483.210	0	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	63.183.410	63.183.410	63.183.410	0	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	99.255.410	59.805.410	59.805.410	0	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	734.696.410	403.354.410	403.354.410	0	
5	01	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	411.144.692	411.144.692	411.144.692	0	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	361.989.600	361.989.600	361.989.600	0	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	49.155.092	49.155.092	49.155.092	0	
5	01	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Laporan	8 Laporan	960.658.584	960.658.584	960.658.584	0	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	36.616.910	36.616.910	36.616.910	0	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	197.266.492	197.266.492	197.266.492	0	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	726.775.182	726.775.182	726.775.182	0	
5	01	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik	227 unit	227 unit	3.024.731.264	3.024.731.264	3.242.713.429	217.982.165	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit	771.388.362	771.388.362	771.388.362	0	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	190 Unit	192.660.410	192.660.410	192.660.410	0	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	2.060.682.492	2.060.682.492	2.278.664.657	217.982.165	penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/750/Set/Bappeda
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yan berlaku	100%	100%	3.549.418.406	2.544.619.206	2.544.619.206	0	
5	01	02	1.01		Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	1.808.235.542	1.305.487.542	1.305.487.542	0	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	84.497.500	73.047.500	15.570.300	-57.477.200	Pergeseran pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Set/Bappeda
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	2 Berita Acara	164.767.400	142.467.400	93.767.400	-48.700.000	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.558.970.642	1.089.972.642	1.196.149.842	106.177.200	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	02	1.02		Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	553.439.032	447.561.132	449.420.232	1.859.100	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	6 Dokumen	522.329.832	420.614.132	424.005.332	3.391.200	Penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Se t/Bappeda
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	31.109.200	26.947.000	25.414.900	-1.532.100	
5	01	02	1.03		Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	41 Dokumen	41 Dokumen	1.096.374.132	735.504.132	735.504.132	0	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	8 Laporan	274.355.700	73.387.700	95.827.700	22.440.000	Penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Se t/Bappeda
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	6 Laporan	582.461.632	486.249.632	483.609.632	-2.640.000	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	27 Dokumen	239.556.800	175.866.800	156.066.800	-19.800.000	
5	01	02	1.04		Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700	56.066.400	54.207.300	-1.859.100	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700	56.066.400	54.207.300	-1.859.100	Penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Set/Bappeda
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	2.266.259.738	1.998.814.538	1.998.814.538	0	
5	01	03	1.01		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	748.575.764	673.332.564	673.332.564	0	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	132.314.520	102.227.320	102.227.320	0	
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	116.194.510	101.187.310	101.187.310	0	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	275.847.622	260.580.422	260.580.422	0	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	224.219.112	209.337.512	209.337.512	0	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	03	1.02		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen	4 Dokumen	748.575.564	671.759.564	671.759.564	0	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	240.081.022	220.637.022	220.637.022	0	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	229.211.812	202.925.812	202.925.812	0	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	85.873.110	82.993.110	82.993.110	0	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	193.409.620	165.203.620	165.203.620	0	
5	01	03	1.03		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	769.108.410	653.722.410	653.722.410	0	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	326.252.960	295.770.960	295.770.960	0	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	78.929.700	50.477.700	50.477.700	0	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	285.012.150	256.286.150	256.286.150	0	
5	01	03	1.03	0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	78.913.600	51.187.600	51.187.600	0	
JUMLAH									29.056.451.327	27.349.354.927	27.707.328.292	357.973.365	

Pada tabel 2. diatas dapat dilihat bahwa pagu pada Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 telah mengalami perubahan dari pagu awal Rp. 29.056.451.327,- (dua puluh sembilan miliar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Namun, per Maret 2025 total rencana biaya pada tahun anggaran 2025 adalah Rp. 27.349.354.930,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Hal ini sebagai upaya dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dan untuk optimalisasi pencapaian kinerja dan efektifitas pelaksanaan anggaran, pada tahapan perubahan RKPD 2025 pagu anggaran Bappeda Provinsi Bali mengalami perubahan menjadi Rp. 27.707.328.292 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 ini, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025.

Lampiran 1.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHAPAN RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RKPD**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										28.036.014.506,00	29.056.451.327,00	27.707.328.292,00	-328.686.214,00						34.865.057.556,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							28.036.014.506,00	29.056.451.327,00	27.707.328.292,00	-328.686.214,00						34.865.057.556,00		
5.01		PERENCANAAN							28.036.014.506,00	29.056.451.327,00	27.707.328.292,00	-328.686.214,00						34.865.057.556,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				87,15 Nilai	87,15 Nilai	22.130.957.426,00	23.240.773.183,00	23.163.894.548,00	2.943.551.334,00						25.074.508.760,00		
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28 Dokumen	33 Dokumen	293.733.500,00	286.122.014,00	231.698.014,00	-62.035.486,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		351.197.457,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	262.401.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	235.592.600,00	227.981.114,00	203.909.114,00	-31.683.486,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.706.406,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.474.400,00	11.474.400,00	11.474.400,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.706.406,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.444.900,00	11.444.900,00	11.444.900,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.294.748,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	20 Laporan	35.221.600,00	35.221.600,00	4.869.600,00	-30.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.794.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3 Jenis	3 Jenis	16.852.532.834,00	16.671.010.143,00	16.671.010.143,00	-181.522.691,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		18.599.278.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	120 Orang/ Bulan	16.520.870.414,00	16.365.850.481,00	16.365.850.481,00	-155.019.933,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.172.957.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	900 Dokumen	197.567.800,00	176.934.150,00	176.934.150,00	-20.633.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			264.657.025,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	134.094.620,00	128.225.512,00	128.225.512,00	-5.869.108,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			161.664.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				48 Jenis	48 Jenis	1.571.810.772,00	1.887.106.486,00	1.646.669.686,00	74.858.914,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		1.487.250.262,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.127.540,00	64.000.810,00	64.000.810,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			63.104.238,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	16 Paket	397.243.220,00	730.788.232,00	870.779.432,00	473.536.212,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			323.989.422,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	126.678.652,00	129.063.004,00	129.063.004,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			139.636.871,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.245.940,00	66.119.210,00	56.483.210,00	-13.762.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			93.784.853,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	67.310.140,00	63.183.410,00	63.183.410,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			99.713.792,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	103.382.140,00	99.255.410,00	59.805.410,00	-43.576.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			113.824.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	738.823.140,00	734.696.410,00	403.354.410,00	-335.468.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			653.196.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan				3 Jenis	3 Jenis	120.606.140,00	411.144.692,00	411.144.692,00	290.538.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		118.191.152,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	73.835.400,00	361.989.600,00	361.989.600,00	288.154.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	46.770.740,00	49.155.092,00	49.155.092,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			63.191.152,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8 Laporan	8 Laporan	890.695.920,00	960.658.584,00	960.658.584,00	69.962.664,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		1.081.791.938,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	40.743.640,00	36.616.910,00	36.616.910,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			44.854.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	194.882.140,00	197.266.492,00	197.266.492,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			381.784.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	655.070.140,00	726.775.182,00	726.775.182,00	71.705.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			655.153.752,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				227 Unit	227 Unit	2.401.578.260,00	3.024.731.264,00	3.242.713.429,00	841.135.169,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		3.436.799.221,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				31 Unit	31 Unit	761.208.980,00	771.388.362,00	771.388.362,00	10.179.382,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.302.110.128,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				190 Unit	190 Unit	203.287.140,00	192.660.410,00	192.660.410,00	-10.626.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			204.189.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1.437.082.140,00	2.060.682.492,00	2.278.664.657,00	841.582.517,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.930.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku				100 Persen	100 Persen	3.536.912.840,00	3.549.418.406,00	2.544.619.206,00	2.807.876.521,00							6.344.789.361,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	1.817.484.840,00	1.808.235.542,00	1.305.487.542,00	-511.997.298,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat		2.875.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	84.497.500,00	84.497.500,00	15.570.300,00	-68.927.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	2 Berita Acara	164.767.400,00	164.767.400,00	93.767.400,00	-71.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.568.219.940,00	1.558.970.642,00	1.196.149.842,00	-372.070.098,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	567.561.600,00	553.439.032,00	449.420.232,00	-118.141.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		996.217.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	536.452.400,00	522.329.832,00	424.005.332,00	-112.447.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		961.889.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi					1 Buku	1 Buku	31.109.200,00	31.109.200,00	25.414.900,00	-5.694.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		34.327.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku				41 Dokumen	41 Dokumen	1.060.496.700,00	1.096.374.132,00	735.504.132,00	-324.992.568,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		2.059.865.901,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi					8 Laporan	8 Laporan	274.355.700,00	274.355.700,00	95.827.700,00	-178.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		722.009.069,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					6 Laporan	6 Laporan	546.584.200,00	582.461.632,00	483.609.632,00	-62.974.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		931.243.786,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					27 Dokumen	27 Dokumen	239.556.800,00	239.556.800,00	156.066.800,00	-83.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		406.613.046,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD				1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700,00	91.369.700,00	54.207.300,00	-37.162.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		413.706.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700,00	91.369.700,00	54.207.300,00	-37.162.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		413.706.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.368.144.240,00	2.266.259.738,00	1.998.814.538,00	1.077.615.195,00							3.445.759.435,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1 Dokumen	1 Dokumen	776.821.100,00	748.575.764,00	673.332.564,00	-103.488.536,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.202.678.933,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	1 Dokumen	140.567.980,00	132.314.520,00	102.227.320,00	-38.340.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		173.030.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	120.321.240,00	116.194.510,00	101.187.310,00	-19.133.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			140.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	285.843.460,00	275.847.622,00	260.580.422,00	-25.263.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			557.047.785,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	230.088.420,00	224.219.112,00	209.337.512,00	-20.750.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			332.241.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				4 Dokumen	4 Dokumen	776.820.700,00	748.575.564,00	671.759.564,00	-105.061.136,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.266.075.702,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	250.076.860,00	240.081.022,00	220.637.022,00	-29.439.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			309.182.443,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	235.080.920,00	229.211.812,00	202.925.812,00	-32.155.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			554.453.860,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	89.999.840,00	85.873.110,00	82.993.110,00	-7.006.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			158.577.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	201.663.080,00	193.409.620,00	165.203.620,00	-36.459.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			243.861.944,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	814.502.440,00	769.108.410,00	653.722.410,00	-160.780.030,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		977.004.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	351.013.340,00	326.252.960,00	295.770.960,00	-55.242.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			406.378.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	78.929.700,00	78.929.700,00	50.477.700,00	-28.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			107.085.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	305.645.800,00	285.012.150,00	256.286.150,00	-49.359.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			356.473.264,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	78.913.600,00	78.913.600,00	51.187.600,00	-27.726.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			107.068.036,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
J U M L A H									28.036.014.506,00	29.056.451.327,00	27.707.328.292,00	-328.686.214,00							34.865.057.556,00		